



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/160/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN RENCANA AKSI PROGRAM
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 185/KSP.00/70/02/2024 Tanggal 28 Februari 2024 tentang Fokus Koordinasi dan Penetapan Area, Indikator dan Sub Indikator Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintah Daerah Tahun 2024, perlu membentuk Tim Pelaksana dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

X

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.

✍

- KESATU : Tim Pelaksana dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan, menindaklanjuti dan memastikan penyelesaian dokumen tindak lanjut dalam rencana aksi yang telah ditetapkan dan mengacu kepada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan sesuai sektor masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Unit Koordinasi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Provinsi Aceh dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut dan penyelesaian rencana aksi; dan
 - c. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Aceh Singkil atas pelaksanaan tindak lanjut Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Aceh melalui Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil yang mempunyai tugas memberi dukungan administrasi dan meng-input laporan dan dokumen kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- KETIGA : Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 berfungsi:
- a. sebagai pedoman pelaksanaan percepatan tindak lanjut Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
 - b. menjadi acuan tahapan pelaksanaan percepatan tindak lanjut Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tahun 2024.
- KEEMPAT : Untuk mendukung pengelolaan administrasi dan kelancaran pelaksanaan tindak lanjut rencana aksi pada masing-masing penanggungjawab indikator/sub indikator keberhasilan untuk masing-masing area intervensi agar membentuk Tim Teknis Percepatan Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

8

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Mei 2024

7 Dzulqaidah 1445 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

A
AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
 3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
 4. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil; dan
 5. Arsip.
- A*

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/160/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 DAN RENCANA AKSI PROGRAM
 PEMBERANTASAN KORUPSI
 TERINTEGRASI PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN 2024

NAMA-NAMA TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI
 TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN 2024

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA
1.	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA I
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA II
5.	Pjt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA III
6.	INSPEKTUR ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
7.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PENDIDIDAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
15.	KEPALA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
16.	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

✍

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA
17.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
18.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
19.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
20.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
21.	ADMIN MCP ACEH SINGKIL	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, t

AZMI

8

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45//160 /2024
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN RENCANA AKSI
 PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI
 TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN 2024

RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE				DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			TARGET	BOBOT	%	PEDUM 2024		APRIL	JUNI	SEPT	DESS			
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12			
PERENCANAAN														
1. Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	90%	90%								Inspektorat		
a. Pembinaan atas Dokumen RKPD		50%	45%	90%	100%							Bappeda		
		1. Laporan Hasil Reviu RKPD oleh Inspektorat yang mereviu tentang kesesuaian program dan kegiatan (Rencana Tahunan/ RKPD) dengan RPJMD tahun pelaksanaan. Reviu RKPD dilakukan setiap tahun.												
		2. Surat hasil fasilitasi RKPD Tahun 2025 Provinsi oleh Dirjen Bangda dan Fasilitasi RKPD Tahun 2025 Kabupaten/ Kota oleh Provinsi.												
		3. Surat tindak lanjut atas hasil fasilitasi RKPD Tahun 2025 oleh Dirjen Bangda atau Provinsi.												

#

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			TARGET	BOBOT	%		BOBOT	%	BOBOT	%	BOBOT		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12		
						<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Penyampaian dan Penginputan Pokir DPRD dilaksanakan maksimal 1 minggu sebelum Musrenbang RKPd dilaksanakan (Pasal 178 Permenadagri 86/ 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah). ➢ Dasar hukum: Tata Tertib Khusus PP 12//2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPR, Pasal 54 huruf (a). 							
					50%	<p>Pengawasan Pelaksanaan Pokir</p> <p>Laporan pengawasan atas pelaksanaan pokok pikiran oleh OPD Teknis pelaksana pokok pikiran.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengawasan dilakukan untuk memastikan kesesuaian perencanaan dan realisasi pelaksanaan pokir. ➢ Laporan disusun oleh masing-masing SKPK Teknis pelaksana pokok pikiran yang mengambarikan hasil pengawasan pokir yang dilaksanakan tahun 2024 mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Data pokok pikiran. 2. Realisasi keuangan dan fisik. 3. Penerima manfaat pokir. 4. Lokasi. 5. Dokumentasi hasil pengawasan. 				√	Bappeda (Mengkoordinir)		

[Handwritten mark]

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			TARGET	BOBOT	%		APRIL	JUNI	SEPT	DESE	12		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12		
II. PENGANGGARAN		13	11.82	91%									
	1. Pencegahan Mark Up Anggaran	25%	21%	84%				√					
	a. Standar Satuan (SHS) Harga	50%	44%	87%	100%	Penetapan SHS							
					10%	1. SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun SHS Tahun 2025.		√					
					20%	2. Peraturan/ Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan SHS dan ASB yang digunakan dalam perencanaan APBD Tahun 2025.		√					
					40%	3. Laporan Penyusunan SHS Tahun 2025 dilengkapi dengan dokumen data dukung berupa kertas kerja penetapan harga yang minimal disediakan oleh 3 penyedia jasa yang dapat diakses melalui e-katalog lokal. Catatan: Penyedia jasa dipastikan yang sudah mendapatkan approval oleh supplier (Perpres 12/2021 PBJ).		√					
					30%	Implementasi SHS Hasil penginputan SHS di aplikasi SIPD RI (hasil unduh dokumen dari SIPD RI dalam bentuk pdf) yang menunjukkan bahwa seluruh SHS telah diinput dalam SIPD RI TA 2025.							
						BPKK							

✍

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE			DOKUMEN (Input:Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET	
			BOBOT TARGET	%	PEDUM 2024		APRIL	JUNI	SEPT	DES				
1	b. Analisis Biaya (ASB) Standar	50%	40%	80%	100%	Penetapan ASB Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan ASB (Fisik dan Non Fisik) yang digunakan dalam perencanaan APBD Tahun 2025. Catatan: 1. ASB untuk kegiatan non fisik, misalnya standar biaya penyelenggaraan rapat, workshop/pelatihan, dll. 2. ASB untuk kegiatan fisik, misalnya standar pembangunan jalan, gedung, dst. Dokumen yang disampaikan adalah penilaian dilakukan atas penyusunan ASB dalam perencanaan RAPBD Tahun 2025.								
					30%	Kelengkapan ASB 1. Dokumen yang menunjukkan ketersediaan ASB fisik dan non fisik. 2. Dokumen yang menunjukkan pelaksanaan koordinasi antar OPD dalam penyusunan ASB. 3. Dokumen yang menunjukkan pelaksanaan koordinasi dan/ atau utilisasi data/pedoman instansi vertikal dalam penyusunan ASB.								
					20%	Implementasi ASB Screenshot menu dan hasil input ASB dalam aplikasi perencanaan TA 2025 (SIPD RJ).								
					10%									

4

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELERSAIAN				PENJAB SKPD / BAGIAN	KET	
			DOKUMEN/TARGET	BOBOT	%		APRIL	JUNI	SEPT	DES			
1	2	3	4	5	6	<p>Reviu APJP</p> <p>Dokumen hasil reviu APJP yang mencakup implementasi ASB, dan kelengkapan ASB (berapa kegiatan PBJ fisik dan non fisik yang tersedia ASB dibandingkan seluruh kegiatan PBJ penda yang seharusnya menggunakan ASB).</p>	8	9	10	11	12		
					40%							Inspektorat	
	2. Penetapan APBD	25%	23%	90%									
	a. KUA dan PPAS	34%	34%	100%	100%				✓				
					50%				✓			BPKK	
					50%				✓				
					50%					✓			
	b. Reviu RKA	33%	33%	100%	100%								
					100%					✓		Inspektorat	
							<p>Screenshot hasil reviu RKA 2025 dalam sistem SIPD RI.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Reviu RKA dilakukan oleh APP. ➢ Minimal screenshot RKA 10 sub kegiatan dari 5 SKPD / OPD dengan pagu alokasi anggaran terbesar (diambil dari SIPD RI). 						

4

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN				PENJAB SKPD / BAGIAN	KET	
			TARGET	BOBOT	%		APRIL	JUNI	SEPT	DESE			
1	2	3	4	5	6	> Bukti cetakan RKA diberikan bukti tanda bahwa dicetak melalui SIPD RI.	8	9	10	11	12		
	c. Penyerahan R APBD dan Penetapan APBD	33%	23%	70%	100%		Penyerahan R APBD Dokumen Berita Acara Penyerahan R APBD 2025 kepada DPRD selambat-lambatnya 60 hari sebelum 1 bulan anggaran berakhir (Pasal 104 PP 12/2019) atau tanggal 1 Oktober 2024.			√			
							Persetujuan APBD Dokumen Persetujuan R APBD 2025 telah disetujui bersama antara DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun (Pasal 106 PP 12/2019) atau tanggal 1 Desember 2024).			√		BPKK	
					40%	Penetapan APBD 1. Dokumen matrik tindak lanjut hasil evaluasi yang dituangkan dalam keputusan Pimpinan DPRD. 2. Surat pengajuan permintaan nomor register ke Biro Hukum Kemendagri atau ke Biro Hukum Provinsi untuk Kabupaten/ Kota.			√				

X

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN				PENJAB SKPD / BAGIAN	KET	
			DOKUMEN/ EVIDENCE	TARGET	PEDUM 2024		APRIL	JUNI	SEPT	DESE			
1	2	3	BOBOT	%	%		8	9	10	11	12		
					10%	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Dokumen hasil pertimbangan TAPPD terhadap pemberian alokasi hibah bansos bersumber dari APBD tahun berkenaan. 			✓				
					10%	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Dokumen Perkada hibah bansos yang terakhir (terbit setelah Permendagri 77/2020) 			✓				
					50%	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Realisasi Bantuan Keuangan ➢ Data rekapitulasi pengajuan; Bantuan Keuangan. ➢ Dokumen perencanaan dari Provinsi dalam memberikan bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/ kota (untuk provinsi). ➢ Dokumen Hasil Evaluasi atas Pemenuhan Bantuan Pemerintah yang mencegah proyek tanpa perencanaan, mark-up, tidak sesuai kebutuhan, anggaran fiktif. ➢ Dokumen tata cara pemberian Bantuan keuangan. ➢ Dokumen formulasi perhitungan pemberian Bantuan Keuangan. ➢ Data realisasi Bantuan Keuangan. ➢ Hasil audit APJP, BPK, BPKP atas Bantuan Keuangan. 							

✍

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE				DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			TARGET	BOBOT	%	%		APRIL	JUNI	SEPT	DES			
1		3	4	5	6	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hibah dan/ atau Bantuan Sosial ➤ Pakta Integritas/ Deklarasi tidak ada benturan kepentingan antara legislatif, SKPK pelaksana (PA/KPA), dan penyedia. ➤ Data Pengajuan Hibah dan/ atau Bantuan Sosial. ➤ Dokumen Hasil Evaluasi atas pemenuhan Hibah dan/ atau Bantuan Sosial yang mencegah proyek tanpa perencanaan, mark-up, tidak sesuai kebutuhan, anggaran fiktif. ➤ Dokumen hasil pertimbangan TAPD terhadap pemberian alokasi hibah bansos. ➤ Dokumen Perkada tentang hibah bansos. ➤ Data realisasi Hibah dan/ atau Bantuan Sosial. ➤ Rincian penerima hibah dan/ atau bantuan sosial. ➤ Dana sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. ➤ Hibah diberikan kepada organisasi yang diakui. ➤ Hasil audit APJP, BPK, BPKP atas Hibah dan/ atau Bantuan Sosial. 	8	9	10	11	12			
	b. Honorarium dan Perjalanan Dinas	50%	45%	90%	100%									

8

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET	
			DOKUMEN TARGET	BOBOT	%		PEDUM 2024	%	APRIL	JUNI	SEPT			DESS
1	2	3	4	5	6	<p>Audit APJP</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Rekapitulasi anggaran dan realisasi perjalanan dinas pada masing-masing SKPK. ➢ Rekapitulasi anggaran dan realisasi honorarium pada masing-masing SKPK. ➢ Laporan Hasil Audit APJP terhadap pelaksanaan perjalanan dinas pada 3 SKPK dengan anggaran perjalanan dinas tertinggi. ➢ Laporan Hasil Audit APJP terhadap realisasi honorarium pada 3 OPD dengan anggaran honorarium tertinggi. <p>Tindak Lanjut Audit APJP</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tindak Lanjut atas Hasil Audit APJP terhadap pelaksanaan perjalanan dinas pada 3 SKPK dengan anggaran perjalanan dinas tertinggi. ➢ Tindak Lanjut atas Hasil Audit APJP terhadap realisasi honorarium pada 3 SKPK dengan anggaran honorarium tertinggi. 	8	9	10	11	12	Inspektorat		
				25%			✓							
				25%			✓							
				25%			✓							
				25%			✓							
				25%			✓							
III.	PENGADAAN BARANG DAN JASA	13	11.58	89%										
	1. Pelaksanaan Pengadaan	34%	26%	78%										
	a. Reviu Konsolidasi Pengadaan dan	50%	35%	70%	100%									

8

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE				DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			BOBOT	TARGET	%	BOBOT		%	APRIL	JUNI	SEPT	DES		
1	2	3	4	5	6	Reviu Perencanaan Pengadaan 1. Notulensi rapat yang dipimpin Sekda dalam rangka pelaksanaan reviu dan konsolidasi PBJ. 2. Dokumen hasil reviu PBJ tahun 2024 yang dilaksanakan oleh UKPPBJ atau PA atau PPK. - Dinas PUPR - Dinas Kesehatan - Dinas Syariat Islam dan Dayah - Dinas Perikanan Konsolidasi Pengadaan 1. Dokumen yang menunjukkan telah dilakukan konsolidasi pengadaan dan menghasilkan daftar proyek strategis Pemda. 2. Dokumen yang menunjukkan telah dilakukan konsolidasi pengadaan terutama pada pelaksanaan PBJ rutin, misalnya: ATK, alat kebersihan, dst.	8	9	10	11	12	Bagian PBJ		
					20%			✓						
					30%					✓				
					30%									
					30%									
					30%									
					20%					✓				
					20%									
					15%									
					15%			✓						
					15%			✓						
	b. Transparansi dan TKDN	50%	43%	85%	100%									
						SIRUP								
						1. Dokumen yang menunjukkan kepatuhan input SIRUP per 31 Maret 2024.								
						2. Dokumen yang menunjukkan Pemda telah melaksanakan updating/ revisi SIRUP dan perubahan posisi SIRUP setelah revisi.						Bagian PBJ		

✗

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			BOBOT	TARGET	PEDUM 2024		APRIL	JUNI	SEPT	DES			
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12		
					15%	1. <i>e-Purchasing</i> 1. Dokumen yang menunjukkan 40% nilai anggaran belanja barang/ jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri (per 31 Desember 2024).				√			
					15%	2. Dokumen yang menunjukkan realisasi nilai transaksi 30% dari total nilai belanja pengadaan (per 31 Desember 2024).				√		Bagian PBJ	
					10%	3. Pakta Integritas PBJ melalui <i>e-purchasing</i> pada 10 PBJ melalui <i>e-purchasing</i> tertinggi.			√			Bagian PBJ	
					30%	Tingkat Komponen Dalam Negeri 1. 10 Kontrak/ SPK PBJ yang menunjukkan bahwa barang telah memenuhi penggunaan dengan komponen TKDN. Kontrak didukung dengan Sertifikat TKDN Kemenerin untuk memastikan Pemenuhan TKDN. Diutamakan pada Pengadaan Alkes dan Elektronik.			√			Bagian PBJ	
	2. Pengendalian Strategis	33%	30%	90%		2. Laporan hasil reviu APIP terhadap pemenuhan TKDN pada 10 Kontrak PBJ (poin 1).			√			Inspektorat	
	a. Reviu HPS	34%	34%	100%	100%								

✗

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			TARGET	BOBOT	%		APRIL	JUNI	SEPT	DES			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12			
					50%	1. Laporan hasil revidu HPS yang dilaksanakan oleh APIP pada 5 kegiatan PBJ Strategis Infrastruktur Pemda. 2. Rekapitulasi Catatan Hasil Revidu APIP pada 5 kegiatan PBJ Strategis Infrastruktur Pemda. 3. Laporan Tindak Lanjut SKPK terhadap Catatan Hasil Revidu APIP pada 5 kegiatan PBJ Strategis Pemda. 4. % tindak lanjut SKPK terhadap Catatan Hasil Revidu APIP pada 5 kegiatan PBJ Strategis Infrastruktur Pemda.		√				Inspektorat dan Bagian PBJ	
								√					
	b. Lelang Dini	33%	33%	100%	100%	1. Dokumen yang menunjukkan bahwa telah dilaksanakan lelang dini pada 5 kegiatan PBJ Strategis Infrastruktur Pemda tahun 2025. 2. Rekapitulasi kegiatan PBJ tahun 2025 yang telah dilaksanakan lelang dini pada tahun 2024.				√	Bagian PBJ		
	c. Kepatuhan Strategis PBJ	33%	23%	70%	100%	Penetapan Proyek Strategis 1. SK Kepala Daerah tentang PBJ Strategis Infrastruktur Tahun 2024. 2. Pakta Integritas Konsultan Pengawas Pekerjaan pada 5 proyek strategis infrastruktur Pemda.		√			Bagian PBJ (Mengkoordinir)		

8

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN				PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			BOBOT	TARGET	BOBOT		%	%	APRIL	JUNI		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	
					20%	3. Reviu kontrak proyek strategis oleh biro/ bagian hukum dan tim teknis OPD (kertas kerja).		√				
					30%	Realisasi Pekerjaan 1. Laporan pemeriksaan pekerjaan periodik oleh PPK. 2. Reviu kontrak proyek strategis oleh biro/ bagian hukum dan tim teknis OPD (kertas kerja).						Bagian PBJ (Mengkoordinir ¹)
					30%	Serah Terima Rekapitulasi progress pekerjaan dan serah terima dibandingkan jadwal sesuai kontrak untuk 5 proyek infrastruktur strategis dengan nilai anggaran tertinggi (Daftar proyek strategis lengkap dengan tanggal kontrak, nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan, progress pelaksanaan, tanggal berakhirnya kontrak, progres saat berakhirnya kontrak yang disahkan oleh konsultan pengawas). Dokumen disetujui oleh PPK dan APIP.				√		SKPA PBJ Strategis dan Inspektorat
	3. Independensi UKPBJ	33%	33%	100%								
	a. TPP UKPBJ	100%	100%	100%	100%							
					50%	1. Peraturan Bupati penetapan TPP UKPBJ. 2. Daftar ASN dalam UKPBJ yang menerima TPP. 3. Dokumen yang menunjukkan bukti pembayaran TPP Kepada Pegawai UKPBJ (ASN).		√				Bagian PBJ

8

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN				PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			BOBOT TARGET	BOBOT %	BOBOT PEDUM 2024 %		APRIL	JUNI	SEPT	DES		
1	2	3	4	5	6	RS yang dikelola provinsi.	8	9	10	11	12	
	2. Standar Layanan	25%	25%	100%		SOP Sektor Perizinan 1. Laporan pelaksanaan koordinasi pemberian rekomendasi teknis yang disusun oleh DPMPPTSP, menggambarkan proses pemberian rekomendasi teknis yang menjadi kewenangan Penda selama tahun 2024, dilaksanakan oleh OPD teknis, mencakup: > Hasil rekomendasi Teknis > Jumlah Izin yang dikeluarkan > Kendala dan Hambatan						
	a. Standar Pelayanan	50%	50%	100%	100%							
					50%	Standar Pelayanan Publik pada Sektor Kesehatan, Perizinan, dan Kependudukan						
					50%	1. Dokumen yang menunjukkan bahwa sudah ada Standar Pelayanan pada sektor kesehatan, perizinan, dan kependudukan.						
					50%	a. Standar Pelayanan Kesehatan		√				Dinas Kesehatan
					50%	b. Standar Pelayanan Perizinan		√				DPMPPTSP
					50%	c. Standar Pelayanan Kependudukan		√				Disdukcapil
					50%	2. Rekapitulasi layanan publik yang sudah memiliki Standar Pelayanan dan layanan publik seluruhnya.				√		DPMPPTSP

8

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN				PENJAB SKPD / BAGIAN	KET	
			BOBOT TARGET	BOBOT %	BOBOT PEDUM 2024 %		APRIL	JUNI	SEPT	DESS			
1	2	3	4	5	6	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat dengan memasukkan parameter: a. Persyaratan b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur c. Waktu Penyelesaian d. Biaya/Tarif e. Produk Layanan f. Penanganan Pengaduan g. Kompetensi Pelaksana h. Perilaku Pelaksana i. Sarana dan Prasarana j. Transparansi Pelayanan k. Integritas Petugas Pelayanan Catatan: SKM dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 dengan 9 unsur SKM dan menambahkan unsur Transparansi Pelayanan dan Integritas Petugas Pelayanan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024. Tingkat partisipasi masyarakat dalam SKM di atas 75 % pada masing - masing layanan: a. Pendidikan pada Dinas Pendidikan b. Layanan Kesehatan di Dinas Kesehatan/RSD/Puskesmas c. Layanan Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	8	9	10	11	12		
	b. Survei Kepuasan Masyarakat	50%	50%	100%	100%		20%					✓	Dinas Pendidikan
											✓	Dinas Kesehatan	
											✓	Disdukcapi	

8

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET														
			DOKUMEN/EVIDENCE		TARGET		PEDUM 2024	APRIL	JUNI	SEPT	DES																
1	2	3	BOBOT	4		%		5	%	6	8	9	10	11	12												
1	3.	Kemudahan Layanan Publik	25%	22%	87%	40%	<p>d. Layanan Perizinan pada DPMPPTSP</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat mencakup 11 unsur pada:</p> <p>a. Pendidikan pada Dinas Pendidikan</p> <p>b. Layanan Kesehatan di Dinas Kesehatan/RSUD/Puskesmas</p> <p>c. Layanan Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</p> <p>d. Layanan Perizinan pada DPMPPTSP</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Tindak Lanjut Rekomendasi.</p>					✓															
								a. Aplikasi perizinan online	34%	34%	100%	100%	<p>Data jumlah perizinan yang menjadi kewenangan Pemda, yang dilayani secara online selama 1 tahun.</p> <p>Catatan: Perizinan yang dimaksud adalah perizinan yang menjadi kewenangan Pemda dan proses persyaratan dasar untuk pemenuhan perizinan berusaha.</p>						✓		DPMPPTSP						
														b. Media Publikasi	33%	33%	100%	100%	<p>Media Publikasi Layanan Publik Sektor perizinan, pendidikan, kesehatan, dan</p>					✓		DPMPPTSP (mengkoordini)	

8

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN				PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			BOBOT	TARGET	%		BOBOT	JUNI	SEPT	DES		
1		3	4	5	6		8	9	10	11	12	
	4. Pengendalian dan pengawasan	25%	22%	86%								
	a. Pengawasan Layanan Publik	25%	21%	85%	100%							
					25%	Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan			√			
					25%	1. Dokumen perencanaan pengawasan yang disusun DPMTTSP.			√			
					25%	2. Laporan hasil pengawasan yang disusun DPMTTSP.				√		
					12,5%	Pengawasan Tata Kelola Pendidikan						
					12,5%	1. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Program Kebijakan dan Pengelolaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.			√			Dinas Pendidikan
					12,5%	2. Laporan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan PPDB yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.			√			
					12,5%	3. Laporan Reviu APPP tentang Pengelolaan Dana BOS.				√		Inspektorat
					12,5%	4. Tindak lanjut hasil reviu Pengelolaan Dana BOS oleh APPP				√		Dinas Pendidikan
	b. Layanan Publik Berintegritas	25%	18%	70%	100%							
					30%	1. Rekapitulasi Permasalahan dan Rencana Aksi Perbaikan Layanan Publik.			√			DPMTTSP

✱

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN				PENJAB SKPD / BAGIAN	KET	
			BOBOT TARGET	%	PEDUM 2024		APRIL	JUNI	SEPT	DEK			
1							8	9	10	11	12		
	c. Tindak Lanjut Pengaduan	25%	25%	100%	100%	1. Rekapitulasi Pengaduan Layanan Publik pada sektor: ➢ Perizinan			✓			DPMPTSP	
						➢ Pendidikan			✓		Dinas Pendidikan		
						➢ Kesehatan		✓		Dinas Kesehatan			
					100%	2. Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Layanan Publik pada: ➢ Perizinan				✓		DPMPTSP	
						➢ Pendidikan				✓		Dinas Pendidikan	
						➢ Kesehatan				✓		Dinas Kesehatan	
						➢ Kependudukan				✓		Disdukcapil	
	d. Tindak Lanjut Reviu APJP	25%	23%	90%	100%	1. Laporan Reviu APJP terkait dengan Layanan Publik (Perizinan/Pendidikan/Kesehatan)							
										✓			

#

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			DOKUMEN/TARGET	EVIDENCE	BOBOT		TARGET	BOBOT	APRIL	JUNI	SEPT		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12			
V.	PENGAWASAN APJP	12	10.55	88%									
	1. Kapasitas APJP	25%	23%	90%									
	a. Kecukupan Kuantitas dan Kompetensi SDM	34%	34%	100%	100%								
					50%	1. Surat Rekomendasi dari Instansi Pembina tentang Formasi JFA dan PPUPD.	✓					Inspektorat	
					50%	2. Daftar SDM APJP: JFA, PPUPD, dan staf (CPNS atau non admin).	✓					Inspektorat	
					50%	3. Jadwal/ kalender pelaksanaan diklat/ kegiatan Pemenuhan Kompetensi terkait pengawasan (Workshop, Seminar, Webinar dan Bimtek).	✓					Inspektorat	
					50%	4. Rekapitulasi kewajiban minimum keikutsertaan diklat/ kegiatan Pemenuhan Kompetensi oleh setiap SDM pengawas (JFA, PPUPD, atau CPNS/ staf).	✓					Inspektorat	
					100%	5. Laporan pemenuhan diklat/ kegiatan Pemenuhan Kompetensi oleh setiap SDM pengawas.				✓		Inspektorat	
	b. Kecukupan Anggaran	33%	28%	85%	100%	1. Dokumen anggaran APJP. ➢ Telah dianggarkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana.	✓					Inspektorat	

8

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN / EVIDENCE				DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			BOBOT	TARGET	%	PEDUM 2024		APRIL	JUNI	SEPT	DES			
1	2	3	4	5	6	yang digunakan adalah hasil penilaian tahun 2024 oleh BPKP	8	9	10	11	12			
	2. Penguatan Kelembagaan	25%	23%	90%										
	a. Pengisian Jabatan Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu (Irbau)	50%	45%	90%	100%									
					5%		1. Pengisian Jabatan Inspektur dan Irbau: ➢ Dokumentasi hasil konsultasi tertulis oleh Kepala Daerah dengan Gubernur atau Mendagri terkait dengan pemberhentian atau mutasi Inspektur dan Irbau			✓				
					10%		➢ Kepatuhan atas mekanisme konsultasi pembentukan panitia seleksi jabatan inspektur daerah sesuai SE 800 poin 4 atau perubahannya.			✓				
					10%		➢ Kepatuhan atas mekanisme pemberhentian atau mutasi inspektur daerah dan/atau inspektur pembantu daerah sesuai SE 800 poin 5 atau perubahannya (untuk provinsi) dan sesuai SE 800 poin 6 untuk kabupaten/kota.			✓				
					5%		➢ SK Kepala Daerah tentang penetapan panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur dan/atau Irbau			✓				
					5%		➢ Laporan atau hasil kerja panitia seleksi pengisian jabatan inspektur atau untuk pengisian jabatan Irbau			✓				

X

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN				PENJAB SKPD / BAGIAN	KET	
			BOBOT TARGET	%	PEDUM 2024		APRIL	JUNI	SEPT	DES			
1	2	3	4	5	6	DOKUMEN (Input Jaga.id)	8	9	10	11	12		
							melaksanakan tugasnya				√		
	b. Pengawasan Dugaan Penyimpangan	500%	45%	90%	100%	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ijien/Inspektur melaksanakan reviu dan menyampaikan hasil reviuinya kepada Gubernur/Bupati atau Walikota. Provinsi 				√			
						<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelaksanaan PUTT atas dugaan PWKKND ➢ Rekapitulasi Informasi terkait potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau PWKKND yang bersumber dari: pengaduan yang berkedar pengawasan atau pelimpahan dari APJP Kementerian atau APJP provinsi (Dumas), pelimpahan dari APH, hasil pengawasan, dan/atau penugasan dari Kepala Daerah. 							
						<ul style="list-style-type: none"> ➢ Rekap hasil telaah atas: Pengaduan, hasil pengawasan dan/atau penugasan yang berisi Kesimpulan utk dilakukan atau tidak dilakukan PUTT. 				√			
						<ul style="list-style-type: none"> ➢ Rekap Laporan PUTT yang diselesaikan berdasarkan kesimpulan hasil telaah untuk melaksanakan PUTT (setiap laporan menginformasikan jumlah temuan yang berindikasi PWKKND). 				√			
						Inspektorat							

#

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN				PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			TARGET	BOBOT	%		BOBOT	APRIL	JUNI	SEPT		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	
					20%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelaporan dugaan PWKKND kepada Inspektur Provinsi/ Ijen ➤ Laporan yang disampaikan oleh Inspektur Kabupaten/Kota kepada Inspektur Provinsi dan oleh Inspektur Provinsi kepada Ijen Kemendagri terkait dengan Indikasi PWKKND (dilitung proporsional berdasarkan jumlah laporan sebagaimana disebutkan dalam poin Rekap Laporan PUTT di atas). 				✓	Inspektorat	
					5%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan BPKP Perwakilan dan Perjanjian Kerja Sama antara Ijen Kemendagri dengan Deputi Bidang PPKD BPKP. ➤ Surat penyampaian permohonan supervisi kepada Inspektur Provinsi/Ijen 				✓		
					10%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Inspektur kepada Direktur Koordinasi dan Supervisi sesuai masing-masing wilayah per semester yang berisi informasi perkembangan pelaksanaan supervisi oleh BPKP Perwakilan 				✓		
					10%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan per 9 Desember 2024 dari Inspektur kepada Direktur Koordinasi dan Supervisi sesuai masing-masing wilayah tentang implementasi Perjanjian Kerja Sama atau Nota Kesepakatan pada tahun 2024 				✓	Inspektorat	

✱

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			DOKUMEN TARGET	BOBOT	%		BOBOT	APRIL	JUNI	SEPT	DES		
1	3.	25%	23%	92%	15%	Perkada tentang FCP atau regulasi terkait pengelolaan risiko yang di dalamnya mengatur tentang pengendalian kecurangan.	8	9	10	11	Inspektorat	12	
								✓					
	a.	34%	31%	90%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkada tentang penanganan laporan pengaduan masyarakat berkadat pengawasan. 2. Surat Sekda yang menyampaikan terkait sosialisasi media pelaporan tindak pidana korupsi. 3. Laporan penanganan pengaduan berkadat pengawasan (PBP) yang mendukung pelaporan secara terbuka ataupun anonim: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Rekapitulasi Pengaduan memuat materi dan kategori pengaduan; ➢ Kinerja Pengelolaan Pengaduan memuat persentase penyelesaian Pengaduan, rata-rata waktu tindak lanjut Pengaduan, dan kualitas tindak lanjut pengaduan; yaitu: 		✓			Inspektorat		
					10%	➢ SP4N-LAPOR		✓		Inspektorat			
					5%	➢ website dan surat elektronik		✓					
					5%	➢ surat, faksimili, SMS dan call center		✓					

✗

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN / EVIDENCE				DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			BOBOT	TARGET	BOBOT	TARGET		APRIL	JUNI	SEPT	DES			
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12			
	b. Probity Audit	33%	33%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi pelaksanaan probity audit. 2. Laporan Hasil Probity Audit 3. Inspektorat menyampaikan 5 Laporan hasil Probity Audit yang merupakan bagian 10 dari Proyek Strategis dengan nilai terbesar di Penda 4. Laporan Hasil Probity Audit yang dimaksud adalah pada tahap: Perencanaan dan Persiapan, Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pelaksanaan Kontrak, dan Pemanfaatan (utamakan pada tahap perencanaan/ persiapan). Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024. 			√			Inspektorat		
					20%				√					
					5%				√					
					10%				√					
	c. Pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi	33%	28%	85%	100%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Reviu atas Standar Harga Satuan (SHS) 2. Laporan Hasil Reviu atas Analisis Standar Biaya (ASB) 			√			Inspektorat		
					10%				√					

8

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			TARGET	BOBOT	%		BOBOT	%	BOBOT	%	APRIL		
1		3	4	5	6		8	9	10	11	12		
					40%	3. Laporan Hasil Audit Kinerja terhadap: a. Dinas Pendidikan Aceh b. Dinas Kesehatan Aceh c. DPMPPTSPA				✓			
					10%	4. Laporan Tindak lanjut atas temuan Inspektoral yang terindikasi merugikan keuangan daerah: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Rekapitulasi temuan Inspektoral yang terindikasi merugikan keuangan daerah per 31 Desember 2023 ➢ Tabel tentang capaian tindak lanjut temuan Inspektoral yang terindikasi merugikan keuangan daerah 				✓			
					20%	5. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Hibah dengan nilai terbesar				✓			
	4. Koordinasi Pencegahan Korupsi	25%	20%	80%	10%	6. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Bantuan Sosial				✓			
	a. Tindak Lanjut SPI	50%	40%	80%	35%	Tindak Lanjut Rekomendasi SPI Tahun 2023 1. Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI 2023 yang disampaikan Penda maksimal dikirimkan tgl 30 April 2024 yang	✓					Inspektoral	

X

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE				DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN				PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			TARGET	BOBOT	%	%		BOBOT	APRIL	JUNI	SEPT		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12		
	b. Sosialisasi Antikorupsi	50%	40%	80%	100%	1. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Antikorupsi dengan sasaran: a. Legislatif yang melibatkan unsur: Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD b. Eksekutif yang melibatkan unsur: Kepala OPD dan Jajaran (terutama PBJ dan Layanan Publik), termasuk sosialisasi antikorupsi kepada OPD pengampu area MCP lainnya. c. Masyarakat Sasaran PBJ dan Layanan Publik (Wali Murid, CSO, Pelaku Usaha, Media Massa, Masyarakat Umum).				√			
					15%	2. Laporan atas pelaksanaan/ capaian Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil SPI yang disampaikan melalui surat yang ditandatangani Sekda.				√			
						disampaikan melalui surat yang ditandatangani Sekda.							
					20%					√			
					20%					√			
					10%					√			

X

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET		
			DOKUMEN / EVIDENCE	TARGET	BOBOT		APRIL	JUNI	SEPT	DES					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12					
VI.	MANAJEMEN ASN	12	11.00	92%	20%	2. Materi sosialisasi menyampaikan program antikorupsi dan program pencegahan korupsi daerah yang telah dilaksanakan Pemda: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengenalan Tindak Pidana Korupsi ➢ SPI dan IPAK ➢ Capaian dan Evaluasi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah yang dilaporkan melalui MCP ➢ Pengelolaan dan Evaluasi Bantuan Kepertingan pada Pemerintah Daerah. ➢ Gratifikasi ➢ Pengabdian masyarakat dan <i>whistleblowing system</i> 									
					10%										
					20%										
					20%		4. Anggaran sosialisasi antikorupsi.								
	1. Tata Kelola ASN	34%	31%	93%											
	a. Perencanaan & Pemenuhan SDM	25%	25%	100%	100%										

8

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE				DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			BOBOT	TARGET	%	PEDUM 2024		APRIL	JUNI	SEPT	DES			
1	2	3	4	5	6	Sekda.	8	9	10	11	12			
					100%		3. Surat persetujuan Kemendagri terkait Hasil Validasi Evaluasi/ Kelas Jabatan.		√					
						Catatan: a. Perubahan evaluasi jabatan disesuaikan berdasarkan peraturan Kementerian mengenai struktur organisasi terbaru/terkini. Jika struktur organisasi pemda berubah maka evajab perlu disesuaikan. b. Struktur Organisasi Pemda mengacu dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi (Permenpan 7 Tahun 2022).								
	c. Sistem Informasi Kepegawaian	25%	20%	80%	100%	1. Data kepegawaian secara lengkap yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi, dan kompetensi berbasis teknologi informasi yang dikelola secara update dan realtime (ex. SIMPEGNAS), dan 2. Data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 tahun yang disusun berdasarkan jabatan, pangkat, dan unit kerja.			√					
					10%	Data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 tahun yang disusun berdasarkan jabatan, pangkat, dan unit kerja.			√			BKPSDM		
					30%	2. Dokumen/ bukti absensi pegawai sudah menggunakan/ memanfaatkan sistem elektronik terintegrasi dengan system penilaian Kinerja.			√					

✗

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE				DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			TARGET	BOBOT	%	PEDUM 2024		APRIL	JUNI	SEPT	DESS			
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12			
	d. Promosi dan Mutasi	25%	23%	90%	100%	Kebijakan internal	internal	✓				BKPSDM		
10%					1. Kebijakan (Pergub/Perbup/Perwali/SK Daerah) terkait Pola Karir.									internal Kepala
10%					2. Kebijakan (Pergub/Perbup/Perwali/SK Daerah) tentang mutasi dan promosi ke JPT, administrator, dan pengawas secara objektif dan transparan (mengacu pada rencana suksesi).									internal Kepala
10%					Pelaksanaan Promosi dan Mutasi (JPT) Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka dan Uji Kompetensi									internal Kepala
								✓				BKPSDM		
									✓				BKPSDM	

8

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE				DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN				PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			TARGET		BOBOT	PEDUM 2024		APRIL	JUNI	SEPT	DES		
1	2	3	4	5			6	8	9	10	11	12	
					10%	2. Surat pernyataan dari PPK yang menyatakan bahwa pejabat yang akan diangkat dan dilantik memiliki rekam jejak jabatan yang baik.			√				
					5%	3. Tangkap Layar Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi.			√				
					10%	4. Berita Acara Pansel dan berita acara ujikom beserta dokumen pendukungnya.			√				
					5%	5. Rekomendasi hasil seleksi terbuka atau uji kompetensi dari instansi berwenang			√				
					40%	Pelaksanaan Promosi dan Mutasi (JA, JP) 1. Laporan Pelaksanaan Pengisian jabatan Administrator dan pngawas. (berisi a.l Dokumen perencanaan promosi dan mutasi, kesesuaian persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir, memperhatikan kebutuhan organisasi, Berita Acara Tim Penilaian Kinerja (Baperjakat), SK Penetapan, Pengangkatan dan Pelantikan).				√	BKPSDM		
	2. Peningkatan Integritas dan Pengawasan	33%	31%		95%								
	a. Manajemen Kinerja	34%	34%		100%	1. Dokumen Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kontrak Kinerja (untuk JPT)		√			BKPSDM		
					40%								

8

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			DOKUMEN / EVIDENCE	TARGET	BOBOT		APRIL	JUNI	SEPT	DES			
			BOBOT	%	%								
1		3	4	5	6		8	9	10	11	12		
					20%	3. Laporan penilaian kinerja instansi (LAKIP dan LPPD 2023) Catatan: a. Dokumen kontrak kinerja dan SKP tahun berjalan 2024. b. Laporan penilaian kinerja tahun 2023.			√		Bagian Organisasi		
					40%	2. SKP Pegawai mulai dari pucuk pimpinan mengacu kepada: a. Perencanaan strategis b. Perjanjian kinerja c. Organisasi dan tata kerja d. Uraian jabatan		√					
					100%	1. Penjelasan berupa simulasi bahwa besaran nilai TPP dihitung berdasarkan nilai dan kelas jabatan serta memperhatikan beban kerja, resiko kerja, lokasi kerja, manajerial, dst 2. Penjelasan yang berupa simulasi pencairan TPP dihitung berdasarkan: Kehadiran Aktivitas harian 3. Pasal dalam Perkada Tambahan Penghasilan Pegawai yang sudah mengakomodir kewajiban pelaporan		√				BKPSDM	
	b. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	33%	33%	100%	100%								
					10%			√				BKPSDM	
					10%			√				BKPSDM	
					10%			√				BKPSDM	
					10%			√				BKPSDM	
					10%			√				BKPSDM	

8

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE				DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET					
			BOBOT	TARGET	%	%		APRIL	JUNI	SEPT	DES								
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12								
	c. Penguasaan Fisik BMD	25%	0%	0%	100%	Capaian Sertifikasi (dilaporkan per triwulan) 1. Jumlah bidang BMD-Tanah yang telah berhasil disertifikasikan di tahun berjalan a. Pendaftaran Pengukuran Tanah b. Pendaftaran Sertifikasi Tanah 2. Jumlah total bidang BMD-Tanah yang telah berhasil disertifikasikan 3. Jumlah total bidang BMD-Tanah													
							10%*												
							10%												
							30%												
							35%												
	d. Penerimaan atas Pemanfaatan BMD	25%	18%	70%	100%	Penguasaan Fisik BMD Tanah 1. Total Daftar Bidang Tanah 2. Daftar Bidang tanah dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Penguasaan Fisik BMD Kendaraan 1. Total daftar kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) 2. Daftar Kendaraan yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak													

*

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI				DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			DOKUMEN/EVIDENCE		BOBOT	TARGET		%	%	APRIL	JUNI	SEPT		
1	2	3	4	5			6						8	9
1	2	3	4	5	6	DOKUMEN (Input Jaga.id)	1. Dokumen Target penerimaan atas pemanfaatan pada BMD tahun berjalan				✓	12	BPKK	
2	Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	25%	22%	88%	100%	DOKUMEN (Input Jaga.id)	2. Lampiran II.E.9 Permendagri 47 Tahun 2021 untuk Target penerimaan ditetapkan berdasarkan target pendapatan dari pemanfaatan BMD yang ada di APBD tahun berjalan. 'Penerimaan Pemanfaatan BMD sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, dihitung dari Target Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.				✓	BPKK		
a.	Rencana Kebutuhan BMD dan Laporan BMD	50%	43%	85%	100%	DOKUMEN (Input Jaga.id)	3. Laporan Realisasi Anggaran atas penerimaan pemanfaatan BMD Tahun berjalan.				✓	BPKK		
							1. Dokumen Penetapan RKBMD tahun berjalan.				✓			
							2. Dokumen Surat pengantar penyampaian laporan BMD semester II tahun sebelumnya dan semester I pada tahun berjalan untuk setiap Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD).				✓	BPKK		

✶

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE				DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			BOBOT	TARGET	%	PEDUM 2024		APRIL	JUNI	SEPT	DES	12		
1		3	4	5	6		8	9	10	11	12			
						3. Rekapitulasi Surat pengantar penyampaian laporan BMD semester II tahun sebelumnya dan semester I tahun berjalan untuk setiap Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD).			✓					
						4. Dokumen Yanggal Agenda masuk/ penerimaan surat penyampaian BMD semester II tahun sebelumnya dan semester I tahun berjalan pada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD).			✓					
						5. Bukti tanda terima Surat Pengantar kepada Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah.			✓					
						6. Jumlah Pengguna Barang (OPD).			✓					
						1. Semester II Tahun 2023								
						➤ Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan		✓						
						➤ Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan		✓						
						2. Semester I Tahun 2024								
						➤ Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan				✓				
						➤ Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan.				✓				
	b. Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD	50%	45%	90%	100%									

✱

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI				DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			DOKUMEN/EVIDENCE		BOBOT	%		%	APRIL	JUNI	SEPT	DES		
			TARGET	PEDUM 2024										
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12				
						1. Jumlah SKPD dan Rekap Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD.				✓				
					20%	2. Adanya Berita Acara Rekonsiliasi (dibuatkan Daftar berita acara hasil rekonsiliasi dengan rincian:				✓				
					20%	a. Rekonsiliasi antara pengurus barang dengan pelaksana akuntansi di SKPD paling sedikit 6 bulan sekali atau setiap semester dalam periode tahun berjalan; (Bukti Berita Acara)				✓				
					20%	b. Rekonsiliasi pengurus barang dengan Bidang Aset paling sedikit 3 bulan sekali dalam periode tahun berjalan (Bukti Berita Acara)				✓				
					10%	c. Rekonsiliasi antara bidang asset dengan bidang akuntansi setahun 2 kali. (Bukti Berita Acara)				✓				
					5%	3. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Inventarisasi pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang dan Pengelola Barang.				✓				
					35%	4. Laporan Hasil Inventarisasi ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang sesuai BMD dalam Penguasaannya.				✓				
					10%	5. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang sesuai				✓				

✱

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			DOKUMEN TARGET	BOBOT	%		BOBOT	JUN	SEPT	DES	APRIL		
1	2	3	4	5	6	kebenarannya atas kebenaran hasil inventarisasi.	8	9	10	11	12		
	3. Penertiban BMD	25%	19%	75%									
	a. Penertiban BMD	100%	75%	75%	61%	Penertiban PSU		√					
						1. Daftar/Rekapitulasi Pemegang SIPPT/IPP/PPR yang ada kewajiban penyerahan PSU ke Pemda.							
						2. Peraturan Kepala Daerah Terkait Serah Terima PSU							
						3. Daftar Perumahan yang PSU-nya sudah jatuh tempo untuk diserahkan ke Pemda.							
						4. Target Penertiban PSU perumahan Tahun Berjalan (harus sudah ada pada triwulan I)							
						5. Daftar Realisasi BAST PSU pada tahun berjalan.							
						6. Daftar/ rekapitulasi realisasi PSU yang sudah diserahkan.							
					5%	Penertiban BMD dikuasai Pihak Ketiga		√				BPKK	

8

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE				DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			DOKUMEN / EVIDENCE		%	%		APRIL	JUNI	SEPT	DES			
			BOBOT	TARGET								BOBOT		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12			
	4. Pengendalian dan Pengawasan	25%	24%	95%										
	a. Tindak Ter-nuan BPK terkait BMD	50%	50%	100%	100%			√						
						1. Laporan LHP BPK atas LKPD pada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).								
						2. Laporan pengawasan pengendalian BMD.			√				BPKK dan Inspektorat	
						3. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) atau informasi pemantauan tindaklanjut lainnya hasil pemeriksaan BPK.			√					
	b. Penyalahgunaan BMD	50%	45%	90%	100%									
						1. Lampiran II.L.5 (Peralatan dan Mesin) sesuai Permendagri 47/2021.				√				
						2. Lampiran II.L.6 (rumah negara/ dinas) sesuai Permendagri 47/2021.				√			BPKK	
						3. Rekapitulasi jumlah SKPD/ OPD				√				

✗

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET	
			TARGET	BOBOT	%		APRIL	JUNI	SEPT	DES				
1	2	3	4	5	6	(5 Januari 2024)	8	9	10	11	12			
					60%	2. Perkada Turunan terkait dengan Pajak Daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan yang berlaku (minimal sudah mengatur pedoman pemungutan, NJOPI untuk PBBP2, penetapan tahun pengenaan PBBP2, Sanksi, minimal perkara terkait juknis/ juklak mata pajak daerah yang ada di masing-masing daerah)		✓						
					20%	3. SOP terkait pajak daerah yang ditetapkan Kepala Daerah		✓						
	b. Database Pajak Daerah Terintegrasi	33%	25%	75%	100%	Database Pajak Daerah 1. Tersedianya database pajak daerah yang sudah lengkap dan akurat meliputi identitas WP, data objek pajak, besaran nilai/kewajiban pajak dan mutasinya serta reputasi kepatuhan pajak secara: - Manual - Berbasis elektronik		✓				BPKK		
					25%	2. Pemutakhiran database pajak daerah secara periodik		✓						
					25%	3. Pemanfaatan database digunakan untuk penetapan kebijakan penganggaran (KUA PPAS, APBD,		✓					BPKK	

✗

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN / EVIDENCE			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			BOBOT	TARGET	PEDUM 2024		APRIL	JUNI	SEPT	DES			
1		3	4	5	6	Perubahan APBD)	8	9	10	11	12		
										√			
	c. Pembayaran Online	33%	28%	85%	100%	Pembayaran Online Pajak Daerah					BPKK		
							1.	Rekap jenis pajak daerah yang sudah tersedia fasilitas kemudahan pembayaran online.	√				
							2.	SOP pembayaran pajak secara online dengan lembaga perbankan.	√				
2.	Peningkatan Pajak Daerah	33%	26%	80%		3.	Capaian pembayaran pajak secara online dibandingkan dengan capaian pembayaran pajak secara keseluruhan (online dan offline).	√					
							a.	Implementasi Inovasi Pajak Daerah	50%	50%	100%	100%	

✍

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN				PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			TARGET	BOBOT	%		BOBOT	JUN	SEPT	DES		
1	2	3	4	5	6	1. Laporan inovasi pajak daerah yang ditandatangani oleh Kepala OPD ditujukan kepada Kepala Daerah yang memuat: a. Latar belakang dan permasalahan b. Tujuan inovasi c. Waktu pelaksanaan inovasi d. Manfaat dari inovasi terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah baik secara kuantitatif maupun kualitatif e. Dokumentasi pelaksanaan inovasi atau bukti dukung lainnya/ perubahan yang terjadi dengan adanya inovasi	8	9	10	11	12	
					40%		✓					BPKA
	b. Capaian Kinerja Pajak Daerah	50%	30%	60%	60%	2. Peningkatan Pajak Setelah Inovasi				✓		
					100%							
	b. Capaian Kinerja Pajak Daerah	50%	30%	60%	60%	Capaian Kinerja Pajak Daerah						
					100%				1. Target Pajak APBD Tahun berjalan.			
					60%	2. Realisasi Pajak Daerah Tahun Berjalan.				✓		

8

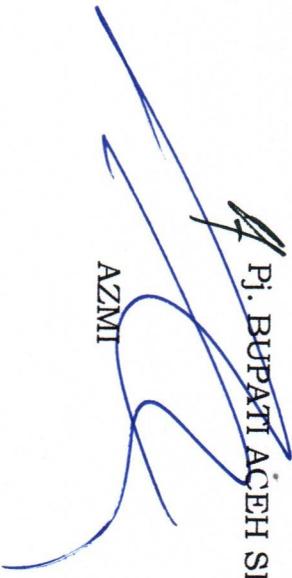
NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN				PENJAB SKPD / BAGIAN	KET	
			TARGET	BOBOT	%		APRIL	JUNI	SEPT	DES			
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12		
					20%	<p>1. Capaian Penagihan Piutang Pajak daerah</p> <p>1. Laporan upaya penagihan piutang pajak daerah Kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet yang memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian tagihan b. Pemberian waktu pembayaran c. Pemberian surat Pemberitahuan d. Pemeriksaan lapangan e. Pemberian sanksi f. Proses hukum (MoU & SKK dengan Datun Kejaksanaan) g. Rekonsiliasi dan Pelaporan 				√		BPKA	
					20%	<p>2. Capaian realisasi hasil penagihan pajak Kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet</p> <p>Keterangan: (Piutang Macet berdasarkan data laporan Audit BPK Th Anggaran 2023, jika laporan Audit BPK terlambat pakai laporan Unaudited/ LHR APIP) Buku I Laporan BPK</p>				√			
	3. Pengendalian dan Pengawasan	33%	33%	100%									
	a. Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	50%	50%	100%	100%	<p>Pengawasan Pajak Daerah</p> <p>1. SOP pengawasan Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah</p>			√			BPKK	

8

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI DOKUMEN/EVIDENCE			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN				PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			TARGET	BOBOT	%		BOBOT	APRIL	JUNI	SEPT		
1	2	3	4	5	6	2. Laporan pelaksanaan dan hasil pengendalian dan pengawasan pajak daerah, antara lain mencakup (tidak terbatas) pada: a. Data Wajib Pajak yang perlu diterbitkan b. Pemberian sanksi administrasi atau pidana. c. Upaya pengawasan antara lain melalui sidak/kunjungan lapangan, pemeriksaan WP, dst d. Pemberian sanksi administrasi atau pidana kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan e. Kendala, hambatan, evaluasi	8	9	10	11	12	
					20%		✓					
	b. Reviu Pajak Daerah	50%	50%	100%	100%	Reviu Optimalisasi Pajak Daerah yang dilaksanakan tahun 2023 atau 2024, sekurang-kurangnya mencakup: a. Kebijakan/ regulasi yang mendorong optimalisasi pajak daerah. b. Penguatan database pajak daerah. c. Inovasi dan peningkatan pajak daerah. d. Upaya penagihan pajak daerah. e. Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak.			✓		Inspektorat	
					70%	Efektivitas pengendalian dan pengawasan pajak daerah			✓			

✗

NO	AREA INTERVENSI / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	BOBOT (PEDUM 2024)	NILAI			DOKUMEN (Input Jaga.id)	KOMITMEN PENYELESAIAN					PENJAB SKPD / BAGIAN	KET
			DOKUMEN/EVIDENCE		BOBOT		TARGET	PEDUM 2024	APRIL	JUNI	SEPT		
1	2	3	4	5		6			8	9	10	11	12
				%	%								
						50%			√		BPKK		
									√		Inspektorat		
TOTAL NILAI			100	87.14	87,14%								


Pj. BUPATI ACEH SINGKIL
 AZMI

X